STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN ANGKA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN HUKUM
BPSDM HUKUM
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI

NOMOR SOP	SOM-07.07.02.02 TAHUN 2025
TANGGAL PEMBUATAN	30 MEI 2020
TANGGAL REVISI	18 MARET 2025
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	**KEPALA BPSDM HUKUM,** **GUSTI AYU PUTU SUWARDANI** **NIP 196610281990012001**
NAMA SOP	**PENYUSUNAN ANGKA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI**

DASAR HUKUM :	
1	Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
4	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Tahun 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan HAM;
7	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8	Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia.

KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi pelaksanaan penilaian kompetensi 2. Memahami peraturan tentang organisasi dan tata kerja 3. Memahami dan mengetahui Rencana Anggaran Biaya

KETERKAITAN :	
1	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DISBURSMENT PLAN, KALENDER KEGIATAN DAN RENCANA KERJA KAS
2	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN REVISI ANGGARAN BELANJA

PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer/Printer 2. Alat Tulis 3. Peraturan Perundang-undangan 4. Jaringan Internet 5. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan

PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses pelaksanaan evaluasi penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum akan terhambat dan tidak berjalan optimal	Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SOM-07.07.02.02 TAHUN 2025
TANGGAL PEMBUATAN	30 MEI 2020
TANGGAL REVISI	18 MARET 2025
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN ANGKA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI

No	**Kegiatan**	**Pelaksana**						**Mutu Baku**			
		Kepala Pusat Penilaian Kompetensi	**Ketua Tim**	**Tim Kerja Lainnya**	**Anggota**	**Kasubbag Tata Usaha**	**Kepala / Sekretaris BPSDM Hukum**	**Kelengkapan**	**Waktu**	**Output**	**Keterangan**
1	Menugaskan Ketua Tim untuk membuat Angka Kebutuhan Anggaran Biaya Puspenkom dengan melakukan rapat koordinasi pembahasan internal Puspenkom terlebih dahulu							Disposisi	30 Menit	Disposisi	
2	Penyiapan rapat koordinasi bersama dengan Kapuspenkom, jajaran Tim Kerja Program dan tim kerja lainnya, serta Kasubbag Tata Usaha untuk membahas usulan Angka Kebutuhan Anggaran Biaya Puspenkom tahun yang akan datang							Disposisi, Notulen Rapat	3 Jam	Usulan Kegiatan Puspenkom Tahun Yang Akan Datang	
3	Melakukan penyusunan Angka Kebutuhan Anggaran Biaya Puspenkom berdasarkan hasil rapat koordinasi internal Puspenkom , menghimpun data dukung dan membuat Nota Dinas Pengantar Kapuspenkom kepada Kepala BPSDM Hukum		T					Disposisi dan hasil rapat koordinasi berupa Usulan Kegiatan dan anggaran	30 Menit	Draft Usulan Angka Kebutuhan Anggaran Biaya dan Nota Dinas	
4	Memeriksa, mengoreksi dan memaraf usulan Angka Kebutuhan Anggaran Biaya Puspenkom serta Nota Dinas Pengantar, lalu menyerahkan kepada Kapuspenkom untuk disetujui, ditandatangani. Jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.	Y			Y			Draft Usulan Angka Kebutuhan Anggaran Biaya dan Nota Dinas	1 Jam	Draft Usulan Angka Kebutuhan Anggaran Biaya dan Nota Dinas	
5	Memeriksa konsep Angka Kebutuhan Anggaran Biaya Puspenkom dan Nota Dinas Pengantar Kapuspenkom kepada Kepala BPSDM Hukum. Jika setuju disyaraf dan menugaskan Kasubbag TU untuk menyampaikan kepada Sekretaris BPSDM Hukum		T					Draft Usulan Angka Kebutuhan Anggaran Biaya dan Nota Dinas	1 Jam	Draft Usulan Angka Kebutuhan Anggaran Biaya dan Nota Dinas	
6	Menyampaikan Nota Dinas Pengantar dan usulan Angka Kebutuhan Anggaran Biaya Puspenkom kepada Sekretaris BPSDM Hukum. Mengarsipkan usulan Angka Kebutuhan Anggaran Biaya Puspenkom	Y						Nota Dinas dan Angka Kebutuhan Anggaran Biaya serta data dukung	30 Menit	Nota Dinas dan Angka Kebutuhan Anggaran Biaya serta data dukung	
7	Menerima Usulan Angka Kebutuhan Anggaran Biaya Puspenkom melalui TU Pimpinan							Nota Dinas dan Angka Kebutuhan Anggaran Biaya serta data	30 Menit	Nota Dinas dan Angka Kebutuhan Anggaran Biaya serta data dukung	

Mengetahui
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi

Pita Fiantini
NIP 196906221994032001